

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PENGOLAHAN SERBUK DARI TANAMAN HERBAL OLEH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG

Riza Desiyanti¹, Rina Nur Azizah², Abu Bakar Basyarahil³

Mahasiswa Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Madura¹

Dosen Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Madura²

Dosen Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Madura³

Rina_nurazizah@unira.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat untuk memimpin dalam memulai proses kegiatan sosial dan memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Industri Kecil Menengah (IKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi nasional, IKM yang merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai mampu berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kec. Sampang berperan penting dalam memberdayakan para pelaku IKM. Pemberdayaan dalam mengembangkan IKM yaitu dengan mengadakan penyuluhan, seminar serta pelatihan guna untuk memberikan motivasi serta wawasan kepada para pelaku pendiri IKM. Dilihat dari kenyataannya Diskopindag belum bisa menjalankan perannya, karena masih banyak para pelaku IKM yang belum menemukan kemampuannya dalam memberdayakan IKM dilihat dari banyaknya IKM yang sudah tidak aktif. Indikator teori dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Pranaka dan Priyono (1996) dimana terdapat Fase Inisial, Fase Partisipatoris dan diantaranya terdapat beberapa indikator di dalamnya yaitu Pelatihan, Penyuluhan, Kebijakan, Keterlibatan Masyarakat Dalam Setiap Program, Antusias Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman (2017) terdapat 4 model interaktif yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian dari indikator tersebut adalah pemberdayaan masyarakat oleh Diskopindag masih belum terlaksana karena masih banyak para pelaku IKM yang belum menemukan kemampuannya dalam memberdayakan IKM dilihat dari banyaknya IKM yang sudah tidak aktif.

Kata Kunci :Pemberdayaan Masyarakat, IKM

1. Pendahuluan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dari ketidakmampuannya. Pemberdayaan yang dilakukan dapat mewujudkan masyarakat yang adil, demokrasi, sejahtera dan maju. Pemberdayaan terhadap masyarakat bisa terlaksana apabila peran pemerintah nyata adanya, karena pemerintah sangat berperan dalam membawa masyarakat dari ketidakmampuannya menjadi berdaya. Fungsi dari adanya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mengayomi, membimbing dan memberdayakan. Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok yang bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menciptakan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik.

Berdasarkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, setiap orang harus memiliki keunggulan untuk dapat bersaing dalam bidang pekerjaan atau bisnis. Dalam perkembangan dan kemajuan saat ini, perekonomian menuntut untuk mencari peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang potensial untuk memenuhi pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pertumbuhan ekonomi nasional, IKM yang merupakan

bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai mampu berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Industri Kecil Menengah (IKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor tersebut dapat mengembangkan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Kecuali industri kecil dan menengah, mereka terbukti mampu bertahan dari krisis dan terus tumbuh karena pada umumnya sektor ini tetap menggunakan sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, dan peralatan. Artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak bergantung pada produk impor.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di wilayah Kecamatan Sampang agar dapat menjalankan usahanya untuk memperoleh kesuksesan dan kemajuan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan bagi para pendiri IKM agar mereka mampu bersaing dan dapat mengembangkan usaha yang didirikan. Ada 3 kategori IKM yaitu pemula, penjual dan pebisnis. Upaya Diskopindag dalam mengembangkan IKM di Kabupaten Sampang yaitu dengan memberikan fasilitas untuk produknya agar bisa di jual di pasar global dengan cara pendaftaran merk, uji nutrisi dan sertifikat halal secara gratis. Diskopindag melakukan hal ini bertujuan untuk memberi rangsangan bagi daerah supaya produk kita diterima di pasar modern karena itu sudah peraturan perundang-undangan jadi Diskopindag melindungi produk kita agar bisa berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal yang ada di Kecamatan Sampang masih belum berjalan secara efektif maka dari itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Karena menurut Diskopindag, para pelaku IKM serta masyarakat di Kab. Sampang memiliki perbedaan karakter yang lebih konsumtif atau tidak bisa menghargai produk sendiri seperti contohnya masyarakat lebih suka belanja produk di luar kota daripada di dalam kotanya sendiri, padahal produk yang dibeli di luar kota tersebut merupakan produk dari dalam kotanya sendiri. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal yaitu mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku untuk produksi serta juga mengalami kesulitan dalam melakukan pemasarannya karena dari pihak Diskopindag tidak melakukan penyuluhan terhadap semua IKM di bidang Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal melainkan hanya satu IKM saja yang diberikan penyuluhan.

Oleh karena itulah Pemerintah Daerah atau Diskopindag harus mengupayakan pemberdayaan masyarakat bagi para pelaku IKM untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi, agar bisa menghadapi pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, terutamanya Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenology, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang neoMarxisme, freudianisme, strukturalisme dan sosiologi kritik Frankfurt School. Istilah Pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi profesi sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik [Hendra H, 2018:9].

Menurut Dedeh M, Ruth R [2019:1] pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu empowerment, Marrian Webster dalam Oxford English Dictionary mengartikan empowerment dalam 2 (dua) arti yaitu :

1. To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
2. To give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan [2019:8] Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

b. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pranaka dan priyono ada tiga fase yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat atau kelompok. Ketiga fase itu adalah :

1. Fase Inisial

Proses pada tahap inisial adalah berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat. Peran pemerintah pada tahap inisial sangat terasa, terutama dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan bantuan kepada para pengusaha. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab dalam memberdayakan pada sector perindustrian. Adapun yang menjadi indikator dalam proses pemberdayaan pada tahap ini, yaitu :

a. Pelatihan

Pelatihan adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan karena adanya kesenjangan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada pekerja atau masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai fasilitas baru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program atau tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas.

c. Kebijakan

Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi dibawahnya agar tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Kebijakan ini bisa berupa bantuan modal, kelengkapan sarana dan prasana.

2. Fase Partisipatoris

Pada tahap partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintahan bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Fase ini baru bisa dilaksanakan ketika fase pertama telah menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini adalah:

a. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program

Keaktifan masyarakat ketika ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar bisa diketahui sejauh mana hubungan antara pemerintahan dan masyarakat, saling mendukung atau saling menjatuhkan.

b. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan
Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat dibutuhkan karena perkembangan program tersebut didasarkan oleh tindak lanjut maupun respon dari masyarakat terkait. Selain memberi pendapat, masyarakat juga diharapkan dapat menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan tersebut.

3. Fase Emansipatoris

Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk mengembangkan IKM mereka sendiri. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan IKM ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari Dinas terkait. Para pelaku IKM bisa menciptakan, memunculkan ide-ide kreatif yang tidak pernah dipikirkan oleh Dinas terkait. Oleh karena itu, Dinas harus selalu memberi dukungan kepada para pelaku IKM yang menggunakan fase ini. Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini adalah :

a. Asset

Asset merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat (pelaku usaha) guna untuk mengembangkan usaha mereka.

b. Volume Usaha

Volume usaha merupakan bina usaha yang dipakai dari pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha yang dikelola.

c. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih mengembangkan usaha tersebut.

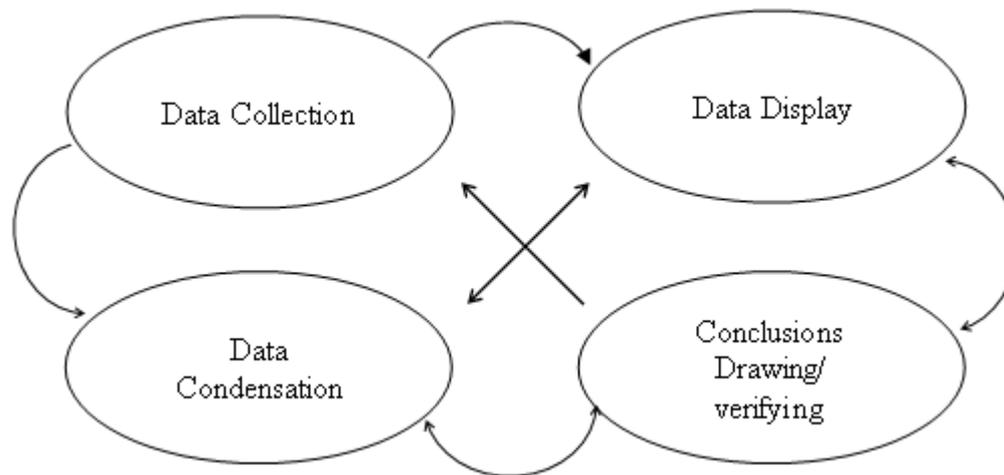
Dalam hal ini ditegaskan bahwa peneliti menggunakan Indikator dari Pranaka dan Priyono yang terdapat dalam 3 (tiga) Fase, yang dilihat dari pemberdayaan masyarakat yang seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga harus diberikan dalam mengambil keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat melanjutkan kegiatan dan mempertanggungjawabkan secara terbuka keputusan yang telah ditetapkan. Akan tetapi peneliti dalam hal ini hanya menggunakan dua fase yaitu fase inisial dan fase partisipatoris dikarenakan dari ke 2 fase tersebut yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan merupakan kegiatan atau program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam memberdayakan masyarakat.

3. Metodologi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti yang dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada tempat Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal yang berlokasi di jalan Pajudan dan Jl. Kusuma Bangsa desa Tanggumong Kec. Sampang dan Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang berlokasi di Jalan Raya Diponegoro 52A, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Adapun alasannya memilih tempat tersebut karena ingin mengetahui tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan IKM Pengolahan Serbuk Dari Tanaman Herbal.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:247) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi dengan cara menjabarkan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Pada analisis data model interaktif dapat digambarkan sebagai berikut :



4. Hasil dan pembahasan

Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan industri yang memiliki peran penting di dalam negeri dalam pembangunan nasional untuk mendorong perekonomian masyarakat. IKM adalah sebuah usaha atau kegiatan yang mengolah dan memproduksi bahan baku dengan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai atau manfaat lebih tinggi contohnya makanan, minuman dan berbagai kerajinan tangan.

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berkaitan dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Pengelolaan Serbuk Dari Tanaman Herbal Oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”.

Dengan hal ini, untuk mengukur tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal peneliti menggunakan teori dari Pranaka dan Priyono (1996) yang menggunakan tiga fase yaitu :

1. Fase Inisial

Berdasarkan fokus penelitian pada tahap ini terbagi dari beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah di wilayah Kabupaten Sampang. Adapun indikator yang dimaksud yaitu pelatihan, penyuluhan dan kebijakan terkait dengan pengembangan IKM. Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan IKM. Pelatihan adalah investasi organisasi yang signifikan dalam sumber daya manusia. Pelatihan juga melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan serta keterampilan pembelajaran sehingga mereka dapat menerapkan pada usahanya.

Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini yaitu :

a. Pelatihan

Sesuai dengan hasil penelitian pelatihan yang diadakan oleh Diskopindag Kec. Sampang Kab. Sampang dalam mengembangkan IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal yaitu mengadakan pelatihan tentang izin produk (P-IRT), label halal, desain kemasan dan sebagainya guna meningkatkan kualitas produk. Semakin berkembangnya zaman para pelaku IKM juga dituntut untuk lebih meningkatkan kreatifitas yang mereka punya agar bisa bersaing. Maka dari itu Diskopindag mencari Pemateri yang bisa langsung terjun ke IKM agar langsung di praktekan bukan hanya teori saja. Jenis pelatihan yang secara umum diadakan oleh Diskopindag yaitu meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat) dan sosialisasi. Diklat yaitu memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para pelaku IKM untuk mengembangkan IKMnya. Sedangkan sosialisasi adalah kegiatan yang menyampaikan program-program dan kebijakan yang terkait dalam pengembangan IKM terutama pengembangan IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal oleh Diskopindag Kec. Sampang Kab. Sampang. Maka hasil wawancara yang telah

disampaikan oleh informan masyarakat pelaku IKM mengenai Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sampang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pelaku IKM meski beberapa dari mereka mau ikut andil dalam pelatihan tersebut jika ada hadiah. Dengan adanya pelatihan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku IKM.

b. Penyuluhan

Selain pelatihan juga ada penyuluhan untuk menambah wawasan dari sumber daya manusianya. Sesuai dengan hasil penelitian tentang penyuluhan yang diadakan oleh Diskopindag Kec. Sampang Kab. Sampang biasanya dilakukan di tempat seperti balai desa atau di kantor kecamatan. Dari hasil wawancara dengan Fungsional Penyuluh Perindag dan Ketua IKM mengatakan bahwa mereka pernah mengadakan penyuluhan tentang Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal tetapi hanya salah satu saja yang diambil oleh Diskopindag dan memberikan strategi agar mereka bisa mengembangkan IKM yang didirikan. Sedangkan pelaku IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal yang saya teliti mengatakan jika beliau tidak pernah ada penyuluhan khusus jadi mereka tidak tahu menahu strategi apa saja yang diberikan oleh Diskopindag. Maka dari itu seharusnya dari Diskopindag melakukan penyuluhan secara merata agar tidak terjadi kecemburuan dari para pelaku IKM. Juga terdapat kendala sarana dan prasarana yang dikemukakan oleh ketua IKM bahwa sarana dan prasarananya masih bersifat tradisional sehingga hasilnya kurang maksimal. Maka hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan mengenai Penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sampang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pelaku IKM yang mereka adakan penyuluhan sedangkan dari masyarakat pelaku IKM yang tidak diberikan penyuluhan masih belum bisa menerima karena memang tidak ada penyuluhan kepada IKM nya.

c. Kebijakan

Selain dari pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat penting dalam memberdayakan masyarakat atau pelaku IKM. Berdasarkan hasil wawancara diatas kebijakan yang diterbitkan oleh Diskopindag dijadikan pedoman dalam pengembangan IKM terutama IKM pengolahan serbuk dari tanaman herbal. Kebijakan dari Diskopindag yaitu mengarah pada undang-undang no 3 tentang perindustrian bahwa setiap IKM harus mengikuti standarisasi. Kebijakan ini dikeluarkan agar bisa membentuk IKM untuk memenuhi kepuasan dari konsumen dan supaya dapat bersaing dengan produk lain, juga dengan adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Diskopindag masyarakat bisa memperoleh informasi terkait perkembangan IKM. Maka hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan Pelaku IKM mengenai Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sampang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pelaku IKM dengan mengikuti kebijakan yang ada yaitu Undang-undang no 3 tentang perindustrian bahwa setiap IKM harus mengikuti standarisasi.

2. Fase Partisipatoris

Masyarakat dalam setiap program yang diadakan oleh Diskopindag selalu terlibat, karena jika masyarakat tidak terlibat maka acara tersebut tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Juga agar masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara pemasaran yang baik. Masyarakat pelaku IKM juga saling mendukung dan memberi pendapat satu sama lain dan juga saling memberi pendapat setiap terjadi kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan.

Fase partisipatoris bisa dilaksanakan setelah fase inisial telah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Dalam fase partisipatoris proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat ini pemerintah semakin mengurangi untuk tidak melibatkan agar para pelaku IKM bisa menunjukkan kemandiriannya dan agar tidak terlalu bergantung dengan pemerintahan.

Adapun yang menjadi indikator dalam fase partisipatoris yaitu :

a. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program

Dalam fase ini akan membahas tentang keterlibatan para pelaku IKM dalam mendukung dan melaksanakan program yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti para pelaku IKM bersedia untuk mengikuti setiap program yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bahkan dari para pelaku IKM juga mengusulkan beberapa program agar bisa mengenalkan macam-macam produk IKM yang ada di Kab. Sampang. Seperti halnya pada tahun 2022 para pelaku IKM diwajibkan untuk menampilkan produknya pada acara Grand Opening Gedung Dekranasda di Kab. Sampang. Diskopindag juga menggandeng beberapa para pelaku IKM tujuannya untuk lebih mendekatkan program dari pemerintah untuk bisa diterima di masyarakat khususnya untuk mempromosikan produk IKM dan juga untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku IKM. Maka hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan mengenai keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang diadakan oleh Diskopindag bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pelaku IKM dan juga manfaat yang dirasakan oleh pelaku IKM sangat banyak terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia.

b. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

Dalam fase partisipatoris ini para pelaku IKM sangat berantusias dalam program pemberdayaan masyarakat pada pengembangan IKM. Dari hasil wawancara dengan Pembina IKM banyak para pelaku IKM yang memberikan usulan program-program yang bisa memperkenalkan macam-macam produk IKM yang ada di Kab. Sampang. Bukan hanya program seperti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh Diskopindag tetapi seperti magang, pameran serta gelar produk. Untuk pelaku IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal sendiri juga ikut andil dalam setiap program yang diadakan oleh Diskopindag, hanya saja pelaku IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal tidak ikut andil dalam program penyuluhan yang diadakan oleh Diskopindag karena hanya salah satu saja yang Diskopindag pilih. Maka hasil wawancara yang telah disampaikan oleh informan mengenai Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan yang diadakan oleh Diskopindag bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pelaku IKM dilihat dari keaktifan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa IKM yang terdapat di Kabupaten Sampang sudah berkembang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri. Adapun strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskopindag untuk mengembangkan IKM yang ada di Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Diskopindag melakukan promosi melalui Gerai IKM S'mart dan juga melakukan pemasaran secara online.
2. Diskopindag membantu para pelaku IKM dengan mendaftarkan produk-produknya ke Gerai IKM S'Mart.
3. Diskopindag juga mempunyai program yaitu E-S'Mart IKM punya kementerian dan produk-produk yang memenuhi syarat kita bantu memasukkan dalam E-S'Mart IKM.
4. Diskopindag bekerjasama dengan pihak indomaret, supaya produk IKM yang memenuhi persyaratan / kriteria bisa diterima di indomaret.
5. Kemudian Diskopindag juga menjalin kerjasama dengan paguyuban di luar daerah supaya produk dari Kabupaten Sampang bisa masuk di tempat-tempat pariwisata.

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kec. Sampang Kab. Sampang masih belum berjalan secara efektif. Pemberdayaan masyarakat IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal masih dihadapkan dengan berbagai

permasalahan yang menghambat terlaksananya pengembangan IKM tersebut. Adapun indikator yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu :

1. Fase Inisial : Diskopindag berperan penting dalam memberdayakan para pelaku IKM dengan mengadakan:
 - a. Pelatihan yang diberikan oleh Diskopindag dapat diterima dengan baik meskipun masih ada saja para pelaku IKM yang mau hadir ketika ada hadiah.
 - b. Penyuluhan oleh Diskopindag tidak berjalan secara efektif dilihat dari Diskopindag yang hanya memberikan penyuluhan hanya beberapa kepada beberapa IKM pengolahan serbuk dari tanaman herbal.
 - c. Kebijakan yang diterbitkan oleh Diskopindag yang diberikan kepada para pelaku IKM agar bisa menjadi pedoman dalam mengembangkan IKMnya dapat diterima dengan baik dengan para pelaku IKM yang mengikuti undang-undang no 3 tentang perindustrian bahwa setiap IKM harus mengikuti standarisasi.
2. Fase Partisipatoris
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang diadakan oleh Diskopindag dapat diterima dengan baik dapat dilihat dari masyarakat yang selalu mengikuti setiap program yang diadakan oleh Diskopindag. Masyarakat pelaku IKM saling mendukung dan memberi pendapat satu sama lain dan juga saling memberi pendapat setiap terjadi kendala yang menghambat perkembangan program pemberdayaan.
 - b. Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan telah memberikan dampak nyata seperti, keaktifan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Akan tetapi dari Diskopindag kurang adil dalam memberikan program pemberdayaan dilihat dari penyuluhan yang diberikan hanya pada satu IKM pengolahan serbuk dari tanaman herbal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa indikator yang dianggap kurang maksimal agar dapat dijadikan masukan untuk pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada IKM terutama IKM Pengolahan Serbuk dari Tanaman Herbal di Kec. Sampang. Saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Indikator pelatihan, para pelaku IKM seharusnya ketika Diskopindag mengadakan pelatihan hadir tanpa mengharapkan hadiah, dikarenakan Diskopindag mengadakan pelatihan guna untuk memberikan motivasi serta pengetahuan yang bisa mengembangkan IKMnya.
2. Indikator Penyuluhan, sebaiknya Diskopindag memberikan penyuluhan ke semua masyarakat pelaku IKM pengolahan serbuk dari tanaman herbal dan tidak hanya salah satunya saja agar para pelaku IKM merasa adil dan sama sama mendapatkan pengetahuan serta ilmu yang diberikan oleh Diskopindag. Juga Diskopindag memberikan strategi yang maksimal sehingga masyarakat pelaku IKM bisa mencapai keinginannya.
3. Indikator Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan, sebaiknya Diskopindag dalam memberikan program pemberdayaan harus adil dan sama rata. Diskopindag juga harus mulai melibatkan masyarakat yang tadinya hanya duduk ketika mengikuti pelatihan atau penyuluhan dengan memberikan penegasan sekaligus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pelaku IKM agar mereka ikut terlibat dalam program yang diadakan.

Referensi

- Abil Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Ahmadi, Rulan. 2020 *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar : De La Macca.
- Hartati Kanty, Sri Handini, Sukei. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka

Jumhur, Aam Amaningsih. 2020. *Keunggulan Bersaing Industri Kecil Menengah*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Saifuddin Yunus, Suadi & Fadli. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh : Bandar Publishing.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.